



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi

Telp. (0713) 390003 Kode pos 31211

**RENCANA KERJA
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberi arah yang lebih konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan demi menjamin konsistensi, komitmen dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 ini bermanfaat dan dijadikan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Talang Ubi,

2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19611124 198903 1 004



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	10
3.3 Program dan Kegiatan	11
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	12
BAB V : PENUTUP	
5.1 Pencatatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	13
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	13
5.3 Rencana Tindak Lanjut	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

1. Merupakan instrument pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Sekretariat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang program/kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2019.

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas dalam melaksanakan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Sesuai Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dalam tahun anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaksanakan 15 (lima belas) Program, 65 (enam puluh lima) Kegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki dana yang bersumber dari APBD Tahun 2018 dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 72.265.996.825,- Terealisasi sebesar Rp. 60.432.605.635,- atau 83,62 % dengan Sisa Anggaran sebesar Rp. 11.833.391.190,-. Adapun rekap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018 dan perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilihat pada Tabel 1 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan

dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di review seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat dilihat pada tabel 2 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- Peningkatan kualitas pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sarana prasarana maka dipandang perlu penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dan/ atau dapat dilakukan peningkatan kualitas sumber daya melalui bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan dalam menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Disamping itu perlu penambahan kuantitas peralatan sarana dan prasarana kantor.

Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat atau keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang (*Opportunities*). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman (*Threats*). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Tantangan/Ancaman adalah suatu kondisi yang ada dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan. Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan disebut analisis SWOT. Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Tantangan /Ancaman (*Threats*) sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
2. Kemajuan globalisasi semakin berpengaruh terhadap pembangunan daerah;

Berdasarkan analisis faktor – faktor Eksternal dan faktor – faktor Internal diatas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) , maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang)
2. Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman)
3. Strategi WO (mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang)
4. Strategi WT (meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman)

Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Peluang (*Opportunities*) sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan informasi dan publikasi Produk Hukum;
2. Meningkatnya kesadaran dan budaya hukum bagi masyarakat;
3. Meningkatkan Kepatuhan hukum masyarakat;
4. Terbitnya dokumen produk hukum daerah;
5. Terciptannya lingkungan masyarakat yang tertib dan aman; dan
6. Meningkatnya administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah secara profesional dan akuntabel.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 tentu harus berpedoman pada RKPD yang telah disahkan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan bagi Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat forum Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan rincian dengan rancangan awal RKPD. Dalam proses hasil penyusunan kebutuhan program/kegiatan terdapat Kegiatan baru di luar RKPD untuk menunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan. Adapun hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3 Lampiran Dokumen Renja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Pada Forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/Kegiatan yang ditunjukkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Hal ini berarti, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 murni berisi Program/Kegiatan yang sudah direncanakan sesuai renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang di rencanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan program strategis dalam Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 ini disamping berpedomen pada program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lemtang Ilir Tahun 2016-2021, juga memperhatikan berbagai program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun. Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

a. Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah ini disusun sebagai turunan/penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016–2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016–2021, dan nantinya dituangkan kembali dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahun berkenaan untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, Dokumen Rencana Kerja ini memiliki tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Sasaran

Adapun sasaran penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai penentuan target-target kinerja yang harus dicapai dalam tahun anggaran berjalan/ berkenaan. Agar dalam pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat dijalankan dengan optimal sebagai salah satu langkah pemenuhan target jangka menengah yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah sebagai langkah pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Target RPJMD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah terdapat beberapa perbedaan pagu indikatif yang dibutuhkan baik yang melebihi maupun lebih kecil dari pagu indikatif yang telah tertuang dalam RKPD. Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada table 5 Lampiran Dokumen Renja ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, rencana kerja dan pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengacu pada dokumen renstra serta kebijakan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pada Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka pembangunan daerah secara profesional dan akuntabel adapun rincian lengkap Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir tahun Anggaran 2019 Prakiraan maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5 Lampiran Dokumen Renja ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Pencatatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi maka kegiatan dan saran yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
3. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pemerintah daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016-2021. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.
2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang laporannya diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan .
3. Pada akhir tahun anggaran tahun 2019 Sekretaris Daerah melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2019 dan memperbaiki pencapaian target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlampir.

Talang Ubi,

2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

SYAHRON NAZIL

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

NIP. 19611124 198903 1 004

Tabel 5
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
APBD TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

URUSAN SKPD : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Sebelum Perubahan			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU 2020		
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 . 4.01.03 . 01 .	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 15,843,165,000					
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. PALI	5000 Lembar	Rp 30,000,000	APBD		Kab. PALI	5000 Lembar	Rp 33,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. PALI	41 Rekening	Rp 926,000,000	APBD		Kab. PALI	41 Rekening	Rp 1,018,600,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kab. PALI	2 Jenis	Rp 700,000,000	APBD		Kab. PALI	2 Jenis	Rp 770,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Milik Daerah	Kab. PALI	2 Jenis	Rp 150,000,000	APBD		Kab. PALI	2 Jenis	Rp 165,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Kab. PALI	35 orang	Rp 197,250,000	APBD		Kab. PALI	35 orang	Rp 216,975,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. PALI	200 Jenis	Rp 300,000,000	APBD		Kab. PALI	200 Jenis	Rp 330,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. PALI	100 Jenis	Rp 261,823,000	APBD		Kab. PALI	100 Jenis	Rp 288,005,300
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. PALI	150 Jennis	Rp 250,000,000	APBD		Kab. PALI	150 Jennis	Rp 275,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. PALI	70 Jenis	Rp 2,431,900,000	APBD		Kab. PALI	70 Jenis	Rp 2,675,090,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga / kantor	Kab. PALI	75 Jenis	Rp 150,000,000	APBD		Kab. PALI	75 Jenis	Rp 165,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. PALI	10 Jenis	Rp 249,192,000	APBD		Kab. PALI	10 Jenis	Rp 274,111,200
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. PALI	12 Paket	Rp 3,450,000,000	APBD		Kab. PALI	12 Paket	Rp 3,795,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. PALI	1000 Laporan	Rp 2,500,000,000	APBD		Kab. PALI	1000 Laporan	Rp 2,750,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. PALI	300 Laporan	Rp 150,000,000	APBD		Kab. PALI	300 Laporan	Rp 165,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknik Perkantoran	Kab. PALI	250 Orang	Rp 4,097,000,000	APBD		Kab. PALI	250 Orang	Rp 4,506,700,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 .	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp 18,575,100,000					Rp 20,432,610,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kab. PALI	3 Unit	Rp 2,715,000,000	APBD		Kab. PALI	3 Unit	Rp 2,986,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ Dinas	Kab. PALI	-	Rp -	APBD		Kab. PALI	-	Rp -
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Kab. PALI	16 Jenis	Rp 1,481,600,000	APBD		Kab. PALI	16 Jenis	Rp 1,629,760,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 11	Pengadaan tanah	Kab. PALI	10 Dokumen	Rp 10,397,500,000	APBD		Kab. PALI	10 Dokumen	Rp 11,437,250,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kab. PALI	3 Unit	Rp 400,000,000	APBD		Kab. PALI	3 Unit	Rp 440,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. PALI	1 Unit	Rp 350,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Unit	Rp 385,000,000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Kab. PALI	30 Jenis	Rp	350,000,000	APBD		Kab. PALI	30 Jenis	Rp	385,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. PALI	300 Unit	Rp	2,300,000,000	APBD		Kab. PALI	300 Unit	Rp	2,530,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 45	Pengadaan Rumah Dinas	Kab. PALI	5 Unit	Rp	175,000,000	APBD		Kab. PALI	5 Unit	Rp	192,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 46	Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Kab. PALI	2 Unit	Rp	406,000,000	APBD		Kab. PALI	2 Unit	Rp	446,600,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Rp	1,586,060,000					Rp	1,744,666,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. PALI	400 Aparatur	Rp	525,000,000	APBD		Kab. PALI	400 Aparatur	Rp	577,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 07	Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	1,061,060,000	APBD		Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	1,167,166,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Rp	520,600,000					Rp	572,660,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Kab. PALI	200 peserta	Rp	101,610,000	APBD		Kab. PALI	200 peserta	Rp	111,771,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 08	Pembinaan Keprotokolan dan Kehumasan	Kab. PALI	180 Peserta	Rp	318,990,000	APBD		Kab. PALI	180 Peserta	Rp	350,889,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 11	Bimbingan Teknis / Training of Trainer	Kab. PALI	20 Aparatur	Rp	100,000,000	APBD		Kab. PALI	20 Aparatur	Rp	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp	478,225,000					Rp	526,047,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. PALI	1 Laporan	Rp	50,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Laporan	Rp	55,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. PALI	2 Laporan	Rp	49,590,000	APBD		Kab. PALI	2 Laporan	Rp	54,549,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05	Penyusunan RKA SKPD	Kab. PALI	4 Dokumen	Rp	52,025,000	APBD		Kab. PALI	4 Dokumen	Rp	57,227,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 06	Penyusunan pelaporan keuangan dan pelaporan barang	Kab. PALI	12 Laporan	Rp	49,020,000	APBD		Kab. PALI	12 Laporan	Rp	53,922,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 08	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	200,700,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	220,770,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 09	Investaris aset / barang investasi SKPD	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	49,850,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	54,835,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	27,040,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	29,744,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Rp	115,000,000					Rp	126,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 05	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kab. PALI	5 Laporan Kecamatan	Rp	115,000,000	APBD		Kab. PALI	5 Laporan Kecamatan	Rp	126,500,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Rp	772,450,000					Rp	849,695,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 01	Penyusunan / pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. PALI	9 Raperda	Rp	772,450,000	APBD		Kab. PALI	9 Raperda	Rp	849,695,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi			Rp	180,000,000					Rp	198,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 11	penyusunan daftar standart harga satuan barang dan upah	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	180,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	198,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah			Rp	10,739,300,000					Rp	11,813,230,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 03	Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Luar dab Dalam Kab. PALI	-	Rp	-	APBD		Luar dab Dalam Kab. PALI	-	Rp	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 06	Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	309,500,000	APBD		Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	340,450,000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 08	Publikasi , Pemberitaan dan Pendapat Umum	Luar dab Dalam Kab. PALI	90 Media	Rp	4,554,000,000	APBD		Luar dab Dalam Kab. PALI	90 Media	Rp	5,009,400,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 09	Fasilitasi Kegiatan KDH dan WKDH	Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	5,675,800,000	APBD		Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	6,243,380,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 12	pengadaan Pakaian dinas KDH/WKDH	Kab. PALI	20 Stel	Rp	200,000,000	APBD		Kab. PALI	20 Stel	Rp	220,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Rp	1,856,050,000					Rp	2,041,655,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 04	Penanganan Kasus Pada wilayah Pemerintahan Kabupaten PALI	Kab. PALI	1 Lembaga	Rp	319,640,000	APBD		Kab. PALI	1 Lembaga	Rp	351,604,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 26	Penataan Sekretariat Tim Pembinaan Jasa Kontruksi	Kab. PALI	-	Rp	-	APBD		Kab. PALI	-	Rp	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 28	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kab. PALI	1 Unit	Rp	1,279,400,000	APBD		Kab. PALI	1 Unit	Rp	1,407,340,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 44	Mnitoring Evaluasi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Kab. PALI	1 Laporan	Rp	93,610,000	APBD		Kab. PALI	1 Laporan	Rp	102,971,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 12	Pengedalian, Monitoring, Evaluasi dan Pembuatan Laporan Kegiatan APBD	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	163,400,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	179,740,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Rp	376,000,000					Rp	413,600,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 05	Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	376,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	413,600,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			Rp	500,805,000					Rp	550,885,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 19	Peningkatan dan Pengembangan Sistem/ Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum	Kab. PALI	1 Sistem/Jaringan	Rp	175,600,000	APBD		Kab. PALI	Sistem/Jaringa	Rp	193,160,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 20	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Kab. PALI	5 Laporan	Rp	325,205,000	APBD		Kab. PALI	5 Laporan	Rp	357,725,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Rp	512,600,000					Rp	563,860,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 03	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Kab. PALI	1 Laporan	Rp	394,100,000	APBD		Kab. PALI	1 Laporan	Rp	433,510,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 22	Penyusunan Laporan Pengembangan Daerah Otonomi Baru	Kab. PALI	-	Rp	-	APBD		Kab. PALI	-	Rp	-
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 12	Pembakuan Nama RUPABUMI	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	118,500,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	130,350,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Program Pembangunan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendidikan Keagamaan			Rp	7,981,845,000					Rp	8,780,029,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 04	Penyelenggaraan kegiatan safari ramadhan	Kab. PALI	5 Kecamatan	Rp	1,237,800,000	APBD		Kab. PALI	5 Kecamatan	Rp	1,361,580,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 10	Pembinaan mental spiritual keagamaan	Kab. PALI	1250 Orang	Rp	2,982,750,000	APBD		Kab. PALI	1250 Orang	Rp	3,281,025,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 03	Penyelenggaraan MTQ	Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	589,720,000	APBD		Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	648,692,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 08	Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kab. PALI	91 Umroh + 1 TPHD	Rp	2,824,075,000	APBD		Kab. PALI	91 Umroh + 1 TPHD	Rp	3,106,482,500
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 15	Penyelenggaraan Safari Jumat	Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	254,500,000	APBD		Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	279,950,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 14	Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar Agama	Kab. PALI	2 Kegiatan	Rp	93,000,000	APBD		Kab. PALI	2 Kegiatan	Rp	102,300,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Program Pembangunan Bidang Ekonomi			Rp	363,000,000					Rp	399,300,000

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 01	Pengumpulan Penyusunan Data dan Informasi untuk Dokumen Kebijakan Perekonomian	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	100,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 04	Koordinasi Monitoring, Evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Bersubsidi	Kab. PALI	1 Laporan	Rp	63,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Laporan	Rp	69,300,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 02	Partisipasi Pameran/ Expo	Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	100,000,000	APBD		Luar dab Dalam Kab. PALI	1 Kegiatan	Rp	110,000,000
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 03	Monitoring, Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	100,000,000	APBD		Kab. PALI	1 Dokumen	Rp	110,000,000
JUMLAH				Rp	60,400,200,000					Rp	66,440,220,000

Talang Ubi, 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ,**

SYAHRON NAZIL
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19611124 198903 1 004